



**Laporan Kinerja Triwulan 2
Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat selama triwulan 2 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 2	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik				
[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	64	Persen	0	0
[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	19	Persen	0	0
[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia				
[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya	41	Persen	0	0
[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	60	Persen	0	0
[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan				
[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya	59,93	Persen	0	0
[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkatkan kualitas kinerjanya	50	Persen	0	0
[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra				
[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	11,55	Persen	0	0
[SK 5] Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra				
[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	2,8	Persen	0	0
[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	1:18	Rasio	0	0
[SK 6] Meningkatnya fasilitas terhadap lembaga penyelenggara program BIPA				



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 2	Realisasi
[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	50	Persen	0	0
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat				
[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat	Sangat Baik	Kategori	-	-
[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik

[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan 2 Tahun 2025, pelaksanaan kegiatan yang mendukung [IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca belum dapat dilaksanakan, sehingga belum terdapat capaian yang dapat dilaporkan. Hal ini disebabkan oleh proses penyesuaian anggaran yang masih berlangsung, seiring dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Instruksi tersebut mengharuskan satuan kerja melakukan peninjauan ulang terhadap rencana kegiatan dan alokasi anggaran, sehingga berdampak langsung pada penjadwalan dan pelaksanaan program literasi yang direncanakan.

Selain itu, IKK ini merupakan indikator baru yang mulai diimplementasikan pada Tahun Anggaran 2025. Hingga akhir Triwulan 2, satuan kerja belum menerima petunjuk teknis (juknis) resmi terkait pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut. Ketiadaan juknis menyebabkan belum adanya kejelasan mengenai bentuk kegiatan, metode pengukuran, serta mekanisme pelaporan yang sesuai. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan masih menunggu arahan lebih lanjut dari instansi pembina agar dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target adalah sebagai berikut.

1. Penyesuaian Anggaran: Pelaksanaan kegiatan masih terkendala oleh penyesuaian anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. IKK Baru: IKK ini merupakan indikator baru yang mulai diimplementasikan pada Tahun Anggaran 2025, sehingga satuan kerja belum menerima petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan kegiatan secara resmi dari instansi pembina.
3. Kesiapan Program: Belum adanya program atau kegiatan yang secara spesifik dirancang untuk mendukung pencapaian indikator ini pada awal tahun.

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pembina
2. Melakukan koordinasi internal kelompok kerja untuk merencanakan ulang kegiatan agar tetap relevan dan berdampak, namun sesuai dengan prinsip efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik

[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik

Progress/Kegiatan

Selama triwulan II tahun 2025, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan dua kegiatan utama yang mendukung pencapaian [IKK 1.2] Persentase produk penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan dalam petunjuk teknis, yaitu Sayembara Penulisan Cerita Berbahasa Daerah dan Bimbingan Teknis Penulisan Cerita Anak Dwibahasa. Kedua kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan bahan bacaan anak yang bermutu dalam bahasa daerah Sasambo (Sasak, Samawa, Mbojo) dan bahasa Indonesia, sebagai upaya pelestarian bahasa serta penguatan literasi multibahasa sejak usia dini.

Pada tanggal 15 April 2025, Balai Bahasa Provinsi NTB menyelenggarakan penjurian papan cerita dalam rangka **Sayembara Penulisan Cerita Anak Berbahasa Daerah Sasambo**. Kegiatan ini bertujuan untuk menyeleksi karya terbaik dari peserta yang telah mengirimkan papan cerita. Tim juri terdiri dari penulis, budayawan, sastrawan, dan akademisi lokal, serta perwakilan dari Balai Bahasa Provinsi NTB. Papan cerita yang terpilih akan diilustrasikan dan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Bahasa Provinsi NTB sebagai bahan bacaan anak yang mendukung pelestarian bahasa daerah. Sebanyak **99 papan cerita lolos seleksi administrasi, terdiri atas 52 karya berbahasa Sasak, 22 berbahasa Samawa, dan 25 berbahasa Mbojo**. Dari jumlah tersebut, tahap awal menetapkan 17 penulis terpilih untuk proses penyuntingan dan penerbitan. Pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 16 April 2025 melalui kanal media sosial Balai Bahasa Provinsi NTB. Penetapan awal ini dipengaruhi oleh kondisi anggaran, di mana pagu untuk penerjemahan masih terblokir sebesar 79,58% dari total Rp759.954.000. Menjelang akhir Triwulan II, terdapat kebijakan pembukaan blokir anggaran secara penuh untuk [IKK 1.2], sehingga memungkinkan penambahan jumlah penulis terpilih. Dari semula 17 penulis, jumlahnya ditetapkan kembali menjadi **71 penulis** yang karyanya akan diterjemahkan dan diterbitkan. Penyesuaian ini menunjukkan komitmen Balai Bahasa Provinsi NTB dalam memaksimalkan pemanfaatan produk penerjemahan untuk peserta didik, sekaligus memperluas dampak literasi anak berbasis bahasa daerah.

Pada tanggal 26–28 Mei 2025, Balai Bahasa Provinsi NTB menggelar **Bimbingan Teknis Penulisan Cerita Anak Dwibahasa** di Hotel Lombok Raya, Mataram. Kegiatan ini diikuti oleh **116 peserta yang terdiri atas penulis, ilustrator, dan penyunting** dari seluruh wilayah NTB. Tujuannya adalah memberikan pendampingan langsung dalam penyusunan naskah cerita anak dwibahasa yang berkualitas, baik dari segi isi, kebahasaan, maupun ilustrasi yang sesuai dengan dunia anak-anak. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi NTB, Dwi Pratiwi, yang menekankan pentingnya pelestarian bahasa daerah dan penguatan literasi anak melalui penyediaan bahan bacaan bermutu. Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan pembekalan dari dua narasumber nasional, yaitu Benny Ramdhani dan Evelyn Ghozalli, yang berpengalaman di bidang literasi anak. Materi yang disampaikan mencakup teknik penulisan cerita anak yang komunikatif dan relevan, penjenjangan buku, prinsip-prinsip penyusunan naskah dwibahasa, serta teknik ilustrasi yang sesuai dengan dunia anak-anak. Melalui kegiatan ini, Balai Bahasa Provinsi NTB berharap dapat mendorong lahirnya buku cerita anak dwibahasa yang tidak hanya menghibur dan mendidik, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai budaya Sasambo kepada generasi muda secara kontekstual dan menarik.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target adalah sebagai berikut.

1. Pemblokiran anggaran yang signifikan pada saat penjurian awal, pagu anggaran untuk penerjemahan masih terblokir sebesar 79,58%, sehingga jumlah karya yang dapat diproses terbatas. Hal ini menghambat kelancaran tahapan penerbitan dan pemanfaatan produk secara maksimal.
2. Ketimpangan jumlah karya berdasarkan bahasa daerah. Terdapat ketidakseimbangan jumlah papan cerita antara bahasa Sasak, Samawa, dan Mbojo. Hal ini berpotensi memengaruhi representasi budaya lokal secara proporsional dalam produk akhir.
3. Keterbatasan kompetensi teknis penulis dan ilustrator. Sebagian peserta belum memiliki pengalaman dalam penulisan cerita anak dwibahasa atau ilustrasi yang sesuai dengan dunia anak-anak, sehingga diperlukan pendampingan intensif agar kualitas naskah dan ilustrasi memenuhi standar.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Optimalisasi anggaran melalui koordinasi intensif. Melakukan komunikasi aktif dengan pihak pengelola anggaran untuk percepatan pembukaan blokir, serta menyusun skenario pelaksanaan yang fleksibel agar kegiatan tetap berjalan sesuai target meskipun dalam kondisi anggaran terbatas.
2. Pemetaan dan penyeimbangan representasi bahasa daerah. Mendorong partisipasi lebih luas dari wilayah berbahasa Samawa dan Mbojo melalui sosialisasi dan pelatihan khusus, agar distribusi karya lebih merata dan mencerminkan kekayaan budaya Sasambo secara utuh.
3. Penguatan kompetensi melalui bimtek terstruktur. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis pada para penulis terpilih yang menghadirkan narasumber berpengalaman untuk memberikan pembekalan teknis yang relevan, sehingga peserta mampu menghasilkan karya yang komunikatif dan layak terbit.

[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia

[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya

Progress/Kegiatan

Progres capaian sampai dengan triwulan dua untuk [IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya adalah sebesar 3.306 orang. IKK ini memiliki capaian output sebanyak 8.037 orang yang mengikuti UKBI selama tahun 2025. Meskipun belum dibuka semua, jumlah blokir pagu untuk triwulan 2 menurut menjadi 36,68% atau sebesar Rp128.017.000 dari total pagu sebesar Rp350.000.000,00. Ketersediaan anggaran sebesar 63,42% dari total pagu memberikan ruang yang lebih besar bagi Tim Kerja UKBI untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan pengujian bukan hanya berfokus di sekolah-sekolah yang ada di Lombok tetapi juga menyasar sekolah-sekolah di Pulau Sumbawa. Berikut ini adalah daftar kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja UKBI.

Pengujian UKBI pertama di Triwulan II Tahun 2025 dilaksanakan di SD Lenterahati, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 16 April 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi yang telah dilakukan pada bulan Februari di Balai Bahasa Provinsi NTB. Sebanyak 60 siswa kelas V dan VI mengikuti pengujian UKBI dengan Paket I, yang mencakup seksi Mendengarkan, Merespons Kaidah, dan Membaca. Kehadiran Balai Bahasa NTB dalam pendampingan menunjukkan komitmen terhadap peningkatan literasi sejak usia dini.

Koordinasi dan pendampingan pendaftaran UKBI dilakukan di SMAN 4 Mataram dengan menyasar siswa kelas X dan XI dilaksanakan pada tanggal 21 April 2025. Tim UKBI Balai Bahasa NTB melakukan koordinasi awal dengan kepala sekolah untuk menyusun jadwal uji, yang kemudian dilanjutkan dengan pendampingan pendaftaran kepada 160 siswa melalui dua sesi. Kepala sekolah menyambut baik pelaksanaan UKBI sebagai



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

bekal penting bagi siswa menghadapi dunia perkuliahan.

Pendampingan pendaftaran UKBI di SMAN 2 Narmada pada tanggal 23 April 2025 menjadi tindak lanjut dari diseminasi tahun sebelumnya. Tim UKBI Balai Bahasa NTB mendampingi hampir 300 siswa dari kelas X dan XII yang telah dipersiapkan untuk mengikuti UKBI. Pendampingan berjalan lancar berkat kesiapan siswa dan koordinasi yang efektif. Seluruh peserta dijadwalkan mengikuti pengujian pada 8 Mei 2025 dalam dua sesi.

Pendampingan pendaftaran UKBI di SMAN 1 Lingsar dilaksanakan dengan fokus pada siswa kelas XI, sebagai bagian dari upaya Balai Bahasa Provinsi NTB memperluas cakupan peserta UKBI di wilayah Lombok Barat. Tiga anggota tim UKBI hadir untuk melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan melaksanakan pendampingan teknis pendaftaran. Kegiatan dilakukan di aula sekolah dengan melibatkan lima perwakilan siswa dari setiap kelas, yang kemudian diarahkan untuk menyebarkan informasi dan praktik pendaftaran kepada teman-teman sekelasnya. Pendampingan dilakukan dalam satu sesi dan berhasil menjangkau total 50 siswa, yang akan menjadi peserta UKBI pada jadwal berikutnya.

Balai Bahasa Provinsi NTB melanjutkan pendampingan pendaftaran UKBI di SMAN 8 Mataram dengan menysasar seluruh siswa kelas X dan XI. Sistem pendampingan yang diterapkan tahun ini mengandalkan pendekatan perwakilan kelas, di mana sebanyak 50 siswa berkumpul di aula sekolah untuk menerima arahan teknis pendaftaran dan strategi menjawab soal UKBI. Selain mendaftarkan diri, para perwakilan ini juga diberi tanggung jawab untuk menyampaikan kembali informasi kepada teman-teman sekelas mereka, sehingga proses pendaftaran dapat berjalan secara mandiri dan menyeluruh. Kegiatan ini menjadi langkah awal menuju pelaksanaan UKBI yang dijadwalkan pada 15 Mei 2025.

Pendampingan UKBI dilanjutkan di SMAN 9 Mataram dengan menysasar siswa kelas X dan XI. Tiga pegawai Balai Bahasa NTB mendampingi kegiatan ini yang diperkirakan akan diikuti oleh 700 siswa. Pengujian dijadwalkan pada 9 Mei 2025, dengan pembagian sesi berdasarkan jenjang kelas.

Sebanyak 240 siswa SMAN 2 Narmada mengikuti pengujian UKBI sebagai tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya. Pengujian dibagi dalam dua sesi untuk kelas X dan XI. Meskipun terdapat kendala jaringan yang menyebabkan beberapa siswa harus mengikuti sesi tambahan di siang hari, hasil pengujian menunjukkan pencapaian predikat Madya sesuai jenjang minimal SMA.

Pengujian UKBI di SMAN 1 Lingsar dilaksanakan dalam satu sesi oleh siswa kelas XI. Sesi pertama dimanfaatkan untuk menuntaskan pendaftaran siswa kelas X. Antusiasme siswa sangat tinggi, terutama karena UKBI menjadi syarat Beasiswa Unggulan. Dari 60 peuji, sebagian besar mencapai skor di atas 500 (predikat Madya), bahkan beberapa siswa meraih predikat Unggul dan Sangat Unggul.

Penguatan pelaksanaan UKBI Adaptif di Kota dan Kabupaten Bima dimulai pada 17 Mei 2025 melalui rangkaian kegiatan pendampingan UKBI Adaptif Merdeka yang berlangsung selama lima hari, mulai tanggal 16 hingga 20 Mei 2025. Kegiatan ini menysasar lima sekolah, yaitu SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4 Kota Bima, serta MAN 2 Kota Bima, dan terbagi dalam dua tahapan utama: pendampingan pendaftaran dan pelaksanaan pengujian. Kepala Balai Bahasa Provinsi NTB, Dwi Pratiwi, turut hadir dan menyampaikan harapan agar capaian UKBI tahun ini melampaui partisipasi tahun sebelumnya. Kegiatan ini dibagi menjadi tiga kelompok: Kelompok I mendampingi 100 siswa kelas XI di SMAN 2 dan SMAN 4 Kota Bima; Kelompok II mendampingi 300 siswa dari SMAN 1 dan SMAN 4 Kota Bima; dan Kelompok III mendampingi 300 siswa kelas X dan XI dari MAN 2 Kota Bima. Seluruh pengujian dijadwalkan berlangsung pada 19-20 Mei 2025. Pendampingan ini menjadi strategi penting dalam memperluas partisipasi siswa dan memperkuat pelaksanaan UKBI di wilayah Bima.

Pada tanggal 3 Juni 2025, Tim Kerja UKBI Balai Bahasa Provinsi NTB melaksanakan kegiatan pendampingan dan koordinasi UKBI di SDN 19 Cakranegara sebagai upaya meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia siswa sejak dini. Kegiatan ini berlangsung dalam dua sesi, yaitu sesi pertama untuk 87 siswa kelas IV dan sesi kedua untuk 65 siswa kelas V. Dalam setiap sesi, siswa mendapatkan bimbingan mengenai materi UKBI dan strategi menjawab soal-soal UKBI, sekaligus memperkuat kompetensi literasi mereka menjelang Tes Kemampuan Akademik tahun depan. Pendampingan ini menjadi bagian dari pendekatan literasi berkelanjutan yang menysasar jenjang pendidikan dasar.

Balai Bahasa Provinsi NTB kembali melanjutkan pendampingan UKBI pada 4 Juni 2025 di SDN 26



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Mataram dengan menyasar 63 siswa kelas IV dan V. Kegiatan ini diawali dengan pemberian gambaran umum tentang UKBI, dilanjutkan dengan penjelasan teknis pendaftaran oleh Hartanto. Tidak hanya siswa yang dilibatkan, guru pendamping kelas juga turut hadir agar dapat membantu proses pendaftaran secara mandiri di kemudian hari. Hartanto menekankan pentingnya ketelitian dan literasi digital dalam proses pendaftaran UKBI. Pengujian bagi siswa SDN 26 Mataram dijadwalkan berlangsung pada 18 Juni 2025.

Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) di Kabupaten Sumbawa Barat dimulai secara kolektif pada 10 Juni 2025, menyasar lima sekolah, yaitu SMAN 1 Taliwang, SMAN 2 Taliwang, MTsN 1 Taliwang, SMAN 1 Seteluk, dan SMAN 1 Pototano. Di hari pertama, kegiatan difokuskan pada dua sekolah: SMAN 1 Seteluk dan SMAN 1 Pototano. Tim UKBI yang terdiri dari lima orang dibagi menjadi dua kelompok. Tim pertama mendampingi 25 siswa kelas XI di SMAN 1 Seteluk, yang kemudian diberi tanggung jawab untuk menyebarluaskan praktik baik pendaftaran UKBI kepada teman-teman sekelasnya. Sementara itu, tim kedua yang terdiri dari Nyoman, Kasman, dan Lentera melakukan pendampingan intensif kepada 180 siswa kelas XI di SMAN 1 Pototano, dengan pendekatan kelompok kecil di enam kelas berbeda. Meskipun kegiatan ini berlangsung di tengah jadwal Ujian Akhir Semester, dukungan kepala sekolah sangat kuat, sehingga ruang khusus untuk sosialisasi dan pengujian tetap tersedia. Pendampingan pendaftaran ini menjadi fondasi penting sebelum pelaksanaan pengujian UKBI yang dijadwalkan pada 12 Juni 2025.

Pendampingan pendaftaran UKBI hari kedua di Kabupaten Sumbawa Barat dilaksanakan pada 11 Juni 2025 di tiga lokasi strategis: MTsN 1 Sumbawa Barat, SMAN 1 Taliwang, dan SMAN 2 Taliwang. Kegiatan ini terbagi dalam dua sesi, dimulai dengan sesi pertama di MTsN 1 Sumbawa Barat yang diikuti oleh 300 siswa kelas XI. Setelah pembukaan, Hartanto bersama tim kerja UKBI memberikan penjelasan teknis mengenai pendaftaran dan strategi menjawab soal UKBI. Sesi kedua dilanjutkan dengan pendampingan di SMAN 1 dan SMAN 2 Taliwang, yang sebelumnya telah melaksanakan UKBI pada tahun lalu. Pendampingan kali ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak UKBI terhadap pembelajaran literasi siswa, khususnya kelas XI yang kembali diuji. Dengan estimasi total peserta mencapai 600 siswa, kegiatan ini menunjukkan konsistensi dan keberlanjutan program UKBI di wilayah Sumbawa Barat.

Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat memfasilitasi pelaksanaan pengujian UKBI di SMAN 6 Mataram pada 14 Juni 2025, sebagai tindak lanjut dari koordinasi dan pendaftaran yang telah dilakukan sebelumnya. Sebanyak 178 siswa dari kelas X dan XI menjadi peserta uji, yang dibagi dalam dua sesi: sesi pagi untuk kelas X dan sesi siang untuk kelas XI. Hartanto, selaku koordinator Tim Kerja UKBI, menjadi satu-satunya pendamping dalam kegiatan ini, menunjukkan dedikasi penuh terhadap kelancaran pelaksanaan UKBI. Kehadiran tunggal Hartanto tidak mengurangi kualitas pendampingan, karena seluruh proses pengujian berjalan tertib dan sesuai dengan prosedur. Kegiatan ini sekaligus memperkuat komitmen Balai Bahasa NTB dalam menjangkau sekolah-sekolah di wilayah perkotaan dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan.

Pendampingan pendaftaran dan pembekalan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi mahasiswa Universitas Nahdlatul Wathan Mataram dilaksanakan pada 16 Juni 2025 sebagai bagian dari kewajiban akademik semesteran bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sertifikat UKBI menjadi syarat mutlak dalam proses pendaftaran yudisium, sehingga kegiatan ini memiliki urgensi tinggi dalam mendukung kelulusan mahasiswa. Sebanyak 40 mahasiswa mengikuti sesi pembekalan yang dipandu oleh Hartanto, Koordinator Tim Kerja UKBI Balai Bahasa Provinsi NTB. Dalam kegiatan ini, Hartanto tidak hanya menjelaskan teknis pengerjaan soal UKBI, tetapi juga membuka ruang diskusi terkait kaidah bahasa Indonesia untuk memperkuat pemahaman mahasiswa. Pendekatan ini bertujuan agar peserta tidak menghadapi ujian dengan pengetahuan yang minim, melainkan dengan kesiapan yang matang. Seluruh peserta dijadwalkan mengikuti pengujian UKBI pada 19 Juni 2025.

Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram dan Universitas Nahdlatul Wathan Mataram berlangsung serentak pada 20 Juni 2025 dengan total peserta sebanyak 61 orang. Kegiatan ini menjadi penentu kelulusan bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, yang diwajibkan melampirkan sertifikat UKBI dalam dokumen akademik mereka. Tim kerja UKBI dibagi menjadi dua: Hartanto mendampingi mahasiswa UNW, sementara Desi Rachmawati mendampingi mahasiswa Ummat. Di Universitas Muhammadiyah Mataram, sebanyak 30 mahasiswa mengikuti pengujian hingga sesi ketiga, dengan tantangan terbesar dirasakan pada sesi kedua yang menguji kepekaan terhadap kaidah baku bahasa Indonesia. Sesi ketiga, yakni membaca, menguji



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

ketahanan dan pemahaman bacaan peserta. Sementara itu, pengujian di Universitas Nahdlatul Wathan berjalan lancar dengan 31 peserta, salah satunya berhasil meraih predikat Sangat Unggul. Ria Saputri selaku Kaprodi turut mendampingi dan menyampaikan harapan agar UKBI menjadi alat ukur kemahiran yang mendorong mahasiswa untuk terus meningkatkan kompetensi berbahasa secara mandiri.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target adalah sebagai berikut.

1. Keterbatasan jaringan internet di lokasi pengujian. Beberapa sekolah mengalami kendala teknis saat pelaksanaan UKBI, terutama gangguan jaringan yang menyebabkan siswa harus mengikuti sesi tambahan di luar jadwal reguler. Hal ini berdampak pada efisiensi waktu dan konsistensi pelaksanaan.
2. Padatnya jadwal akademik sekolah. Pelaksanaan UKBI sering bersinggungan dengan agenda Ujian Akhir Semester atau kegiatan sekolah lainnya, sehingga perlu penyesuaian waktu yang ketat agar tidak mengganggu proses belajar-mengajar.
3. Kesiapan teknis mahasiswa dan siswa. Di beberapa kampus dan sekolah, peserta mengalami kesulitan teknis saat login atau memahami alur pengujian, yang berpotensi menurunkan performa mereka dalam menjawab soal UKBI.
4. Distribusi pendampingan yang terbatas. Jumlah personel pendamping dari Tim Kerja UKBI belum sebanding dengan jumlah sekolah dan peserta yang harus dijangkau, sehingga beberapa kegiatan hanya didampingi oleh satu orang, seperti yang terjadi di SMAN 6 Mataram.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut.

1. Penyediaan kuota internet dari kantor yang dibawa dan disiapkan oleh Tim UKBI. Selain itu, sosialisasi modul simulasi pada laman UKBI yang bisa digunakan bagi siswa dan mahasiswa sebelum pengujian, agar mereka terbiasa dengan sistem dan tidak mengalami kendala saat login atau menjawab soal.
2. Kolaborasi intensif dengan guru dan dosen pendamping. Melibatkan guru kelas dan dosen prodi sebagai mitra pendamping dalam proses pendaftaran dan pelaksanaan UKBI, sehingga distribusi tanggung jawab lebih merata dan pendampingan lebih efektif.
3. Penjadwalan fleksibel dan terintegrasi dengan kalender akademik. menyesuaikan jadwal UKBI dengan kalender akademik sekolah dan kampus agar tidak berbenturan dengan ujian semester atau kegiatan penting lainnya, serta memberi ruang bagi siswa untuk fokus.
4. Ekspansi wilayah dan segmentasi peserta. Memperluas cakupan pelaksanaan UKBI ke wilayah-wilayah yang belum tersentuh, seperti Pulau Sumbawa dan sekolah swasta, serta menasar segmen peserta baru seperti mahasiswa lintas prodi dan siswa SD.

[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia

[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya

Progress/Kegiatan

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, capaian indikator [IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya mencapai 198 orang dari target output sebesar 275 orang. Capaian ini merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan Kemahiran Berbahasa Indonesia yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur. Program ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Balai Bahasa Provinsi Nusa



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Tenggara Barat dalam meningkatkan kualitas kebahasaan masyarakat. Kegiatan dilaksanakan pada 7-8 Februari 2025 di Aula Rupatama 2 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang yang terdiri dari pegawai pemerintah, tenaga pendidik, wartawan media massa, dan generasi muda.

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kompetensi berbahasa, Balai Bahasa juga menyelenggarakan kegiatan serupa di Kabupaten Lombok Barat pada 24-25 Juni 2025. Kegiatan bertajuk Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Pegawai Pemerintah, Tenaga Pendidik, dan Wartawan Media Massa ini diikuti oleh 98 peserta dan dilaksanakan di Aula Sekretariat Daerah Gedung Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Pada hari pertama, peserta menerima materi dari lima narasumber, antara lain: Dwi Pratiwi (Kebijakan Bahasa dan Sastra), Hartanto (Pengenalan UKBI), Kasman (Ejaan Bahasa Indonesia), dan Zamzam Hariro (Pembentukan Kalimat Bahasa Indonesia). Meskipun terdapat blokir anggaran pada kode A sebesar 32,84%, kegiatan tetap dilaksanakan dengan penyesuaian agar capaian kuantitas dan kualitas tetap relevan serta sesuai dengan prinsip efisiensi. Tahapan kegiatan Kemahiran Berbahasa Indonesia disusun menjadi enam tahap, yaitu: (1) penjurian peserta sesuai sasaran, (2) tes awal dan penyampaian materi secara daring selama dua minggu, (3) penyampaian materi secara luring selama dua hari, (4) pendampingan implementasi materi dan tes akhir, serta (5) pelaksanaan UKBI bagi peserta terpilih yang aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target adalah sebagai berikut.

1. Kurangnya komitmen peserta. Sebagian peserta menunjukkan partisipasi yang belum konsisten, terutama dalam mengikuti seluruh tahapan kegiatan dari awal hingga akhir. Hal ini berdampak pada efektivitas transfer materi dan validitas hasil evaluasi akhir.
2. Blokir anggaran kode A (32,84%). Pembatasan anggaran menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan secara optimal, termasuk dalam hal jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan penyediaan materi pendukung.
3. Variasi latar belakang peserta. Peserta berasal dari berbagai sektor (pemerintah, swasta, pendidikan, media), sehingga tingkat pemahaman dan kebutuhan terhadap materi kebahasaan tidak seragam, menyulitkan penyampaian materi secara merata dan tepat sasaran.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan skema tahapan yang fleksibel dan terintegrasi. Kegiatan dirancang dalam enam tahapan yang menggabungkan metode daring dan luring, serta pendampingan dan tes akhir. Strategi ini memungkinkan peserta tetap terlibat meskipun memiliki keterbatasan waktu atau lokasi, sekaligus menjaga kualitas capaian.
2. Pemanfaatan UKBI sebagai insentif akademik. Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) pada akhir kegiatan diberikan kepada peserta terpilih yang aktif mengikuti seluruh rangkaian. Ini menjadi motivasi tambahan bagi peserta untuk berkomitmen penuh selama kegiatan berlangsung.
3. Segmentasi materi berdasarkan profil peserta. Materi disusun dengan pendekatan tematik yang relevan dengan latar belakang peserta, seperti kebijakan bahasa untuk ASN, ejaan dan pembentukan kalimat untuk tenaga pendidik, serta praktik kebahasaan untuk wartawan. Pendekatan ini meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta terhadap materi.

[SK 3] Meningkatkan Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan

[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Progress/Kegiatan

IKK 3.1 Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya ini direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan III. Tim Kelompok Kerja Pembahu pada triwulan satu tetap melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan seperti pengusulan ulang bentuk dan lokasi kegiatan yang untuk menyesuaikan jumlah anggaran yang tersedia. Selain itu, Tim Kerja Pembahu juga menyiapkan juknis kegiatan terbaru yang disusun relevan dengan ketentuan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Terdapat blokir kode A 34,47% atau Rp57.448.000,00 dari total pagu sebesar Rp166.675.000,00. Meskipun pada triwulan II ini sudah ada kelonggaran jumlah pagu anggaran tetapi Tim Kerja Pembahu harus tetap harus menyesuaikan metode dan tahapan-tahapan kegiatan agar tetap relevan dan bisa mencapai target RO yang telah ditetapkan sebanyak 45 lembaga terbina dengan tingkat persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya sebesar 59,93%.

Kendala/Permasalahan

Tim Kerja Pembahu menghadapi keterbatasan dalam merancang kegiatan yang mencakup 45 lembaga terbina. Hal ini berdampak pada pemilihan metode, lokasi, dan intensitas pendampingan yang dapat diberikan.

Strategi/Tindak Lanjut

Memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah baik itu lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan untuk mendukung komitmen lembaga terpilih bisa mengikuti kegiatan baik daring maupun luring sampai tahap akhir kegiatan.

[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan

[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya

Progress/Kegiatan

Pada triwulan II, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan kegiatan Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi di Kota Mataram sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja komunitas literasi dalam rangka mendukung capaian [IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 29--31 Mei 2025, dan diikuti oleh 90 peserta yang terdiri atas tenaga pendidik, pegiat literasi, serta perwakilan komunitas dari berbagai wilayah. Bertempat di Aula Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kompetensi membaca melalui penyampaian materi, diskusi, dan praktik literasi.

Kegiatan ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, yang menyampaikan tugas dan program prioritas masing-masing. Kolaborasi antarinstansi menjadi strategi penting dalam memperkuat ekosistem literasi di daerah. Selain itu, pemaparan data literasi oleh Ketua Konsorsium NTB Membaca menyoroti rendahnya indeks literasi di



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Nusa Tenggara Barat, yang mendorong perlunya intervensi terstruktur dan berkelanjutan dari berbagai pihak.

Sebagai bagian dari penguatan komunitas, diluncurkan program inovatif “Benar-Benar Membaca dan Membaca Benar-Benar (BBM-MBB)” yang bertujuan mendekatkan anak-anak dengan bahan bacaan secara menyenangkan dan bermakna. Peserta dikenalkan dengan konsep dan teknis pelaksanaan program ini, serta diminta untuk mengimplementasikannya di komunitas dan sekolah masing-masing. Untuk memastikan keberlanjutan, peserta dibagi ke dalam kelompok pendidik formal dan komunitas, lalu menyusun rencana tindak lanjut dan menandatangani komitmen bersama. Kegiatan ditutup dengan arahan dari Bunda Literasi Provinsi NTB yang hadir secara daring, serta penyampaian masukan dari peserta terkait kebijakan literasi daerah. Dukungan terhadap pengadaan buku lokal, pelibatan komunitas dalam program pemerintah, dan penguatan ruang baca menjadi sorotan utama. Balai Bahasa menegaskan optimisme terhadap keberhasilan program, dengan menekankan pentingnya partisipasi semesta dan kesinambungan implementasi di lapangan sebagai kunci peningkatan kualitas kinerja komunitas literasi.

Target IKK ini adalah 50 persen dari 89 komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya. Target ini didukung oleh ketersediaan pagu sebesar Rp 320,947,000 atau hanya setengah dari total yaitu Rp608.000.000,00. Meskipun sudah sebagian dibuka tetapi Tim Kerja Literasi tetap harus menyesuaikan metode dan lokasi pelaksanaan kegiatan yang tetap relevan dengan kuantitas dan kualitas capaian serta tetap sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Tantangan ke depan, Tim Kerja harus tetap menyelaraskan capaian kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan definisi operasional IKK sehingga capaian di satker sejalan dengan capaian di lembaga pembina dan juga dengan capaian prioritas kementerian.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target adalah sebagai berikut.

1. Ketersediaan dana yang hanya separuh dari total pagu menyebabkan pembatasan dalam jumlah kegiatan, cakupan wilayah, dan intensitas pendampingan komunitas. Hal ini berdampak pada terbatasnya jumlah komunitas yang dapat dijangkau secara optimal.
2. Meskipun kegiatan telah dilaksanakan, belum seluruhnya terukur secara langsung terhadap indikator peningkatan kualitas kinerja komunitas. Hal ini menimbulkan risiko ketidaksesuaian antara capaian di tingkat satuan kerja dan capaian yang diakui oleh lembaga pembina pusat.
3. Data yang menunjukkan rendahnya indeks literasi di NTB menjadi tantangan mendasar, karena komunitas literasi terbina masih menghadapi hambatan struktural seperti minimnya bahan bacaan, rendahnya minat baca, dan keterbatasan ruang literasi yang layak.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Dengan mengonsolidasikan kegiatan di lokasi strategis seperti Kota Mataram, pelaksanaan dapat menjangkau lebih banyak komunitas secara efisien. Pemusatan juga memungkinkan sinergi antarinstansi dan penguatan kapasitas peserta secara kolektif.
2. Program “Benar-Benar Membaca dan Membaca Benar-Benar” dapat dijadikan alat ukur peningkatan kualitas komunitas melalui indikator implementasi, partisipasi anak, dan keberlanjutan kegiatan. Dokumentasi pelaksanaan dan tindak lanjut komunitas menjadi bukti konkret capaian IKK.
3. Tim Kerja Literasi perlu menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi yang mengacu langsung pada definisi operasional IKK. Pelaporan berbasis eviden, seperti rencana tindak lanjut, komitmen tertulis, dan hasil praktik komunitas, akan memperkuat validitas capaian di tingkat pusat.

[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan II ini, Tim Kerja Perkamusan fokus pada pengambilan data Inventarisasi Bahasa Daerah dalam rangka memenuhi capaian target RO sebanyak 2 produk dan target IKK sebesar 11,55% untuk Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi. Rangkaian kegiatan pengambilan data adalah sebagai berikut.

Inventarisasi kosakata bahasa Sasak telah dilaksanakan pada tanggal 27–30 April 2025 di Kabupaten Lombok Timur. Tim KKLP Perkamusan dan Peristilahan Balai Bahasa Provinsi NTB mengunjungi empat kecamatan, yaitu Wanasaba, Aikmel, Sikur, dan Sembalun. Narasumber pertama yang ditemui adalah Habiburrahman, budayawan dari Majelis Adat Sasak (MAS), yang memberikan kosakata terkait makanan perayaan dan pelaksanaan haji. Di Sembalun, tim berdiskusi dengan Riardi Kencana dari Lembaga Adat Gumi Sembahulun (LAGS), menggali kosakata adat, pertanian, kuliner, tanaman obat, dan arsitektur. Tim juga mengunjungi Pasar Aikmel untuk mendokumentasikan kosakata kuliner dan perdagangan yang digunakan masyarakat sehari-hari.

Kegiatan inventarisasi di Lombok Timur dilaksanakan dengan dua tujuan utama, yaitu mendokumentasikan kosakata untuk Kamus Bahasa Sasak-Indonesia dan menyeleksi kosakata yang akan diserap ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Selama empat hari pelaksanaan, tim berhasil mengumpulkan 100 kosakata bahasa Sasak yang relevan dan masih digunakan secara aktif. Pada hari ketiga dan keempat, tim telah menemui narasumber dari Yayasan Anak Yatim Rinjani, Nurmaji, untuk memperluas cakupan kosakata dari perspektif sosial dan komunitas. Hasil dari kegiatan ini telah menjadi bagian dari produk pengembangan bahasa yang tervalidasi dan berkontribusi langsung terhadap capaian target IKK dan RO Triwulan II.

Inventarisasi dilanjutkan pada tanggal 9–12 Mei 2025 di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, mencakup enam desa: Tanak Awu, Pengembur, Rembitan, Teruwai, Sengkol, dan Kawo. Narasumber pertama, Lamuh Syamsuar dari Lesbumi, memberikan kosakata tentang pertanian dan peralatan tradisional. Narasumber kedua, Abi, Pembayun Desa Tanak Awu, menyampaikan kosakata terkait keris dan proses pembuatannya. Kegiatan ini memperluas cakupan kosakata budaya dan tradisi yang masih digunakan secara aktif oleh masyarakat.

Pada hari kedua, tim telah menemui Lalu Suryadin, pemangku adat Desa Rembitan, yang memberikan kosakata tentang tradisi perkawinan dan hukum adat. Tim juga telah mengunjungi Pasar Kuta untuk mendokumentasikan kosakata yang digunakan dalam interaksi jual beli. Pada hari ketiga, tim berhasil menemui Mujahiddunnafis, budayawan dari Kecamatan Pujut, dan menggali kosakata tambahan yang memperkaya hasil inventarisasi. Seluruh kosakata yang dikumpulkan dari Lombok Tengah telah digunakan untuk memperkaya Kamus Bahasa Sasak-Indonesia dan KBBI, serta memperkuat validasi produk kebahasaan yang menjadi indikator capaian IKK 4.1.

Kegiatan terakhir dalam rangkaian Triwulan II telah dilaksanakan pada tanggal 22–25 Mei 2025 di Kabupaten Lombok Barat, mencakup wilayah Narmada, Kuripan, Banyumulek, Gunungsari, dan Kediri. Tim telah berdiskusi dengan Sanusi dari Majelis Adat Sasak dan tokoh-tokoh adat di Desa Kuripan Selatan, seperti Satriawan, H. L. Munasib, dan H. Ali Mazhar. Kosakata yang diperoleh mencakup bidang budaya dan tradisi lokal. Pada hari kedua, tim melanjutkan pengambilan data di wilayah Narmada, Lingsar, dan Gunungsari, dengan fokus pada pewayangan dan kuliner khas Sasak. Seluruh hasil inventarisasi telah digunakan untuk memperkaya kamus bahasa Sasak dan menambah entri kosakata daerah dalam KBBI, sehingga mendukung pencapaian target IKK dan RO secara optimal.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target adalah sebagai berikut.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

1. Kosakata yang ditemukan sangat beragam dan kontekstual, bergantung pada adat, lokasi, dan praktik sosial masyarakat setempat. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dalam dokumentasi dan validasi.
2. Beberapa narasumber adat dan budaya memiliki jadwal yang padat atau tinggal di lokasi terpencil, sehingga koordinasi dan pelaksanaan wawancara memerlukan fleksibilitas tinggi dan penyesuaian waktu yang tidak selalu ideal.
3. Beberapa wilayah yang menjadi sasaran inventarisasi, seperti Sembalun dan daerah pedalaman Lombok Barat, memiliki medan yang sulit dijangkau dan akses transportasi terbatas, yang berdampak pada efisiensi waktu dan logistik tim.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Tim menjalin komunikasi intensif dengan lembaga adat seperti Majelis Adat Sasak (MAS), Lembaga Adat Gumi Sembahulun (LAGS), dan Lembaga Adat Desa (LAD) Krise Agung, serta tokoh budaya lokal untuk membangun kepercayaan dan memperlancar proses penggalan kosakata secara partisipatif.
2. Pengambilan data dilakukan di berbagai titik—desa, pasar, rumah adat, hingga yayasan sosial—untuk memastikan kosakata yang dikumpulkan mencerminkan keragaman sosial budaya dan memperkuat validitas produk kebahasaan.
3. Tim menerapkan metode pencatatan dan klasifikasi kosakata secara sistematis, baik untuk kebutuhan Kamus Bahasa Sasak-Indonesia maupun pemerikayaan KBBI, sehingga hasil inventarisasi dapat langsung diolah menjadi produk yang tervalidasi.

[SK 5] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra

[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan

Progress/Kegiatan

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, pelaksanaan [IKK 5.1] pada satuan kerja Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat belum dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh belum terselenggaranya kegiatan pemetaan yang menjadi dasar verifikasi bahasa, sastra, dan aksara dalam Peta Kebinekaan. Pada periode ini, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melaksanakan rangkaian kegiatan strategis berupa Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dan Peningkatan Kepakaran Pemetaan. Kegiatan DKT yang dilaksanakan pada 11 Juni 2025 ini bertujuan untuk membahas urgensi pemetaan dan memvalidasi titik pengamatan untuk periode 2025–2029. Kegiatan ini menjadi fondasi penting dalam menentukan arah dan cakupan pemetaan bahasa, sastra, dan aksara secara nasional. Seluruh satuan kerja termasuk Balai Bahasa Provinsi NTB turut dilibatkan dalam kegiatan ini sebagai bagian dari kolaborasi lintas satuan kerja di bawah koordinasi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Selanjutnya, peningkatan kepakaran pemetaan bahasa dilaksanakan secara daring dan luring pada 2–16 Juni 2025, dengan materi yang mencakup dialektologi, penentuan titik pengamatan, aktivasi aplikasi dialek, analisis variasi bahasa, hingga praktik pengolahan data lapangan. Pada kegiatan daring seluruh tenaga teknis dilibatkan sebagai penguatan dan peningkatan kompetensi pegawai khususnya tentang pemetaan bahasa dan sastra. Balai Bahasa Provinsi NTB menugaskan dua orang perwakilan yaitu Gilang Aryo Damar, S.S. dan M. Syamsur Rijal, S.Hum. untuk mengikuti kegiatan luring di Jakarta, yang selanjutnya diharuskan untuk mengimbaskan pengetahuan kepada tim pemetaan di daerah.

Untuk pemetaan sastra, kegiatan peningkatan kepakaran dilaksanakan pada 23 Juni–3 Juli 2025. Materi yang diberikan meliputi pengenalan manuskrip, praktik preservasi sastra cetak berbahasa daerah, digitalisasi manuskrip, serta teknik perekaman data sastra lisan. Balai Bahasa Provinsi NTB menugaskan satu orang perwakilan yaitu Asry Kurniawaty, S.S untuk mengikuti kegiatan luring, dengan harapan dapat memperkuat kapasitas internal dalam mendokumentasikan dan memetakan kekayaan sastra lokal. Adapun



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

pemetaan aksara masih menunggu informasi lanjutan dari pusat, sehingga belum ada kegiatan peningkatan kepakaran yang dapat diikuti pada Triwulan II. Meski demikian, Balai Bahasa Provinsi NTB telah melakukan koordinasi internal dan persiapan administratif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemetaan aksara apabila jadwal resmi telah ditetapkan. Dengan demikian, capaian [IKK 5.1] pada Triwulan II belum menunjukkan progres kuantitatif dalam bentuk penambahan entri terverifikasi. Namun, satuan kerja telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan persiapan dan peningkatan kapasitas yang menjadi prasyarat penting bagi pelaksanaan pemetaan pada triwulan berikutnya. Diharapkan, hasil dari kegiatan DKT dan pelatihan ini akan mempercepat proses verifikasi dan integrasi data ke dalam Peta Kebinekaan secara lebih sistematis dan akurat

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target adalah sebagai berikut.

1. Karena kegiatan pemetaan bahasa, sastra, dan aksara baru memasuki tahap persiapan dan peningkatan kepakaran, satuan kerja belum memiliki data yang dapat diverifikasi dan diintegrasikan ke dalam Peta Kebinekaan. Hal ini menghambat pencatatan capaian kuantitatif pada indikator.
2. Jadwal kegiatan pemetaan, khususnya untuk aksara, belum dirilis secara resmi oleh pusat. Ketidakpastian ini menyulitkan satuan kerja dalam menyusun rencana kerja yang sinkron dengan target indikator.
3. Meskipun telah ada perwakilan yang mengikuti pelatihan, jumlah SDM yang memiliki kepakaran teknis dalam pemetaan masih terbatas. Ini berpotensi memperlambat proses pengumpulan dan verifikasi data di lapangan.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Satuan kerja dapat segera mengadakan kegiatan internal berbasis hasil pelatihan DKT dan peningkatan kepakaran, seperti lokakarya atau bimbingan teknis, untuk memperluas pemahaman tim pemetaan di daerah dan mempercepat proses pengumpulan data.
2. Melalui komunikasi intensif dan pelaporan berkala, satuan kerja dapat meminta kejelasan jadwal dan panduan teknis dari pusat, sekaligus menyampaikan kesiapan daerah untuk mendukung pelaksanaan pemetaan secara efisien.
3. Dengan memanfaatkan data awal, jejaring komunitas bahasa, dan sumber daya lokal, satuan kerja dapat mulai merancang peta kerja pemetaan yang adaptif dan siap dijalankan segera setelah instruksi pusat diterima. Hal ini termasuk identifikasi titik pengamatan, narasumber, dan metode dokumentasi.

[SK 5] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra

[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan II Tahun 2025, pelaksanaan [IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah terhadap Penutur Muda yang Terimbas sudah mulai dilaksanakan mulai dari tahap koordinasi, diskusi terpumpun, dan bimbingan teknis guru utama. Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengawali pelaksanaan program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) tahun 2025 dengan kegiatan Rapat Koordinasi Antarinstansi dan Diskusi Kelompok Terpumpun yang berlangsung selama tiga hari pada tanggal 21—23 Mei 2025 di Hotel Santika, Mataram. Kegiatan ini menghadirkan 50 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk instansi pemerintah daerah, budayawan, akademisi, sastrawan, dan guru master. Kehadiran para pemangku kebijakan, baik secara langsung maupun daring, menunjukkan komitmen bersama dalam mencari solusi atas tantangan pelindungan bahasa daerah di NTB.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan praktik baik pembelajaran bahasa daerah oleh perwakilan dinas pendidikan dari sepuluh kabupaten/kota. Diskusi ini menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus penguatan strategi implementasi di daerah. Selain memperkuat dukungan lintas sektor, kegiatan ini juga menghasilkan revisi tujuh modul pembelajaran untuk masing-masing bahasa daerah (Sasak, Samawa, dan Mbojo), yang akan digunakan dalam Bimbingan Teknis Guru Utama dan diselaraskan dengan mata lomba Festival Tunas Bahasa Ibu.

Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan komitmen kuat dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) melalui kegiatan Bimbingan Teknis Guru Master yang digelar pada 17–19 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan sejak tahun 2022, dengan total 1.004 guru master telah dilatih hingga tahun ini. Sebanyak 251 guru master dari sepuluh kabupaten/kota di NTB menjadi peserta aktif, terdiri dari guru bahasa Indonesia, anggota KKG dan MGMP, kepala sekolah, serta pengawas. Pembukaan kegiatan dilakukan secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Dora Amalia, sebagai bentuk dukungan kelembagaan terhadap pelestarian bahasa daerah melalui jalur pendidikan dasar dan menengah.

Kegiatan bimbingan teknis dibagi ke dalam enam kelas berdasarkan jenjang dan bahasa daerah, yakni SD dan SMP untuk bahasa Sasak, Samawa, dan Mbojo. Sebanyak 18 narasumber dari tiga bahasa utama di Nusa Tenggara Barat menjadi pendamping utama dalam menyampaikan tujuh materi inti Revitalisasi Bahasa Daerah. Evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya menunjukkan adanya tantangan yang perlu ditangani bersama, seperti belum tersedianya pelajaran muatan lokal, keterbatasan waktu pelaksanaan, dan variasi dukungan dari pemerintah daerah. Meski demikian, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, menyempurnakan modul pembelajaran, dan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih konkret dalam mendukung pelestarian bahasa daerah di lingkungan sekolah.

Pada hari kedua pelaksanaan Bimbingan Teknis Guru Master Revitalisasi Bahasa Daerah Provinsi NTB Tahun 2025, Balai Bahasa Provinsi NTB menghadirkan rangkaian materi intensif yang mencakup praktik pembelajaran bahasa Sasak, Samawa, dan Mbojo untuk guru SD dan SMP dari sepuluh kabupaten/kota. Di kelas Sasak, peserta mengikuti sesi Begolohan, pidato, Bawaran, Menembang, mendongeng, serta penulisan puisi dan cerpen yang dipandu oleh narasumber berpengalaman seperti Lalu Teguh Maulana, Muhammad Hakiki, Yuyun Setiawaty, Sadarudin, dan Imam Safwan. Kelas Mbojo menyajikan praktik Menembang, penulisan aksara, pidato, komedi tunggal, mendongeng, serta penulisan cerpen dan puisi bersama Edy Mulyadi, Munawar, Suaidin, Abdul Basith, Wawan Kurniawansyah, dan Sudirman. Sementara itu, kelas Samawa menampilkan praktik pidato, komedi tunggal (Bagesaq), penulisan aksara, mendongeng (Batuter), penulisan cerita pendek, dan pembelajaran Balawas yang dipandu oleh Burhanuddin, Wiyanto, Kaharudin, Rosida Resyad, Dr. Suharli, dan Syamsuddin. Seluruh sesi berlangsung sejak pagi hingga sore secara paralel dan intensif, memperkuat kapasitas guru dalam mengajarkan bahasa daerah secara kreatif dan kontekstual, serta mendorong pelestarian budaya lokal melalui pendekatan lisan dan tulis yang menyeluruh.

Hari ketiga pelaksanaan Bimbingan Teknis Guru Master dalam rangka Revitalisasi Bahasa Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi NTB ditutup dengan sesi pengimbasan yang menandai transisi dari pelatihan ke implementasi nyata di lapangan. Setelah tiga hari pembelajaran intensif mencakup tujuh kemampuan berkesenian—penulisan cerita pendek, pidato, pembacaan puisi, mendongeng, komedi tunggal, menulis aksara, dan tembang—para peserta dibekali materi pengimbasan oleh Kasman dan Gilang Aryo dari Tim Kerja Pelindungan dan Pemodernan Bahasa dan Sastra. Diskusi terbuka mengungkap perlunya pendampingan lanjutan bagi guru master, yang ditanggapi dengan komitmen pengawalan berkelanjutan oleh Dwi Pratiwi. Komitmen peserta untuk mengimbasan materi ke lingkungan sekolah dan masyarakat dibacakan dan ditandatangani secara simbolis, memperkuat semangat kolaboratif lintas daerah. Penutupan berlangsung meriah dengan penampilan seni dari peserta Sasak, Samawa, dan Mbojo, serta pemberian hadiah interaktif yang menambah semarak suasana. Rangkaian kegiatan ini akan berlanjut dengan proses pengimbasan dan pemantauan hingga September, sebagai bentuk konkret pelestarian bahasa daerah melalui jalur pendidikan.

Kendala/Permasalahan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target adalah sebagai berikut.

1. Tidak semua kabupaten/kota menunjukkan komitmen penuh terhadap pelaksanaan muatan lokal bahasa daerah, sehingga implementasi program menjadi tidak seragam.
2. Durasi pelatihan yang singkat dan belum adanya mekanisme pendampingan berkelanjutan membuat guru master kesulitan dalam mengembangkan pembelajaran secara mandiri di sekolah.
3. Beberapa daerah masih kekurangan bahan ajar yang sesuai dengan konteks lokal, sehingga proses pembelajaran belum optimal dan belum terintegrasi dalam kurikulum.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Melalui Rapat Koordinasi dan penandatanganan komitmen pengimbasan, sinergi antara Balai Bahasa, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah diperkuat untuk mendukung kebijakan muatan lokal.
2. Tujuh modul untuk masing-masing bahasa (Sasak, Samawa, Mbojo) telah disusun dan direvisi sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis dan pengimbasan di sekolah.
3. Komitmen peserta untuk menginvasi materi ke guru lain, siswa, dan orang tua, serta adanya jadwal pemantauan Juni-September, menjadi langkah konkret untuk memastikan keberlanjutan program di tingkat akar rumput.

[SK 6] Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA

[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)

Progress/Kegiatan

Progres capaian output yang mendukung IKK [IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri) pada triwulan ini adalah 6 lembaga BIPA (Pondok pesantren Dea Malela, Suka Bahasa Private Learning, Sekolah Nusa Alam, Mataram Lingua Franca, Mandalika Intercultural School, dan Desa Bilebante). Sebesar 55,79% atau sebesar Rp98.296.000 dari total pagu telah tersedia pada triwulan II sudah bisa didistribusikan dalam berbagai kegiatan yang mendukung capaian kinerja utama. Tim Kerja BIPA Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian target Persentase Lembaga Penyelenggara Program BIPA yang Terfasilitasi.

Balai Bahasa Provinsi NTB memenuhi undangan dari Suka Bahasa, sebuah lembaga BIPA untuk memberikan pendampingan awal kepada enam pengajarnya di Restoran Anda, Kuta pada tanggal 15 Mei 2025. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pengajaran BIPA melalui diskusi dan berbagi praktik baik. Hal ini berfungsi sebagai sinergi Balai Bahasa Provinsi NTB dengan komunitas atau lembaga BIPA di wilayah Nusa Tenggara Barat. Ketua Tim Kerja BIPA, Zamzam Hariro, menyampaikan pentingnya analisis kebutuhan pemelajar sebelum memulai kelas, agar pembelajaran lebih terarah dan efektif. Para pengajar Suka Bahasa yang mengampu sekitar 30 pemelajar dari Prancis, Jerman, Belanda, dan Australia, sangat antusias mengikuti sesi ini. Mereka berharap kerja sama dengan Balai Bahasa NTB dapat terus berlanjut, terutama dalam mendukung para pelaku usaha asing di Kuta agar mampu berkomunikasi dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia. Kegiatan ini menjadi langkah awal yang strategis dalam memperkuat fondasi pengajaran BIPA di wilayah pariwisata.

Sebagai bagian dari program inovatif Mandalika-BIPA untuk Masyarakat Inovatif (Mandalika-BUMI), Balai Bahasa Provinsi NTB menyelenggarakan kegiatan di Hotel Lost Inn Kuta pada tanggal 14 Juni 2025 yang melibatkan 25 peserta dari komunitas Suka Bahasa Private Learning dan komunitas lainnya. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan Balai Bahasa sebagai UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sekaligus mendorong implementasi program internasionalisasi bahasa Indonesia. Kepala Balai Bahasa, Dwi Pratiwi, menekankan pentingnya menjadikan komunitas sebagai mitra strategis dalam pengembangan BIPA,



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

mengingat NTB merupakan destinasi wisata unggulan. Diskusi interaktif dipandu oleh Tim Kerja BIPA, di mana peserta dibagi dalam tiga kelompok untuk membahas tema-tema yang sering muncul saat berinteraksi dengan wisatawan asing. Hasil diskusi dipresentasikan dan ditanggapi antarkelompok, menciptakan pertukaran pengetahuan yang memperkaya pemahaman dan strategi pengajaran BIPA.

Kegiatan Mandalika-BUMI juga dilaksanakan di Desa Bilebante, Lombok Tengah tanggal 15 Juni 2025 berfokus pada penguatan dan evaluasi pendampingan masyarakat desa wisata. Kepala Balai Bahasa NTB, Dwi Pratiwi, menyampaikan harapan untuk memperluas kerja sama, termasuk pelestarian bahasa daerah dan penguatan program internasionalisasi bahasa Indonesia. Desa Bilebante yang kerap dikunjungi wisatawan asing dinilai memiliki potensi besar sebagai ruang praktik komunikasi bahasa Indonesia. Tim Balai Bahasa melakukan observasi dan penjarangan fungsi komunikasi yang umum digunakan wisatawan, yang kemudian akan disusun menjadi bahan fasilitasi BIPA berbasis kebutuhan lokal. Peserta kegiatan dibagi dalam lima kelompok untuk mengisi formulir penjarangan dan mempresentasikan ide-ide yang relevan. Hasilnya, Balai Bahasa NTB memperoleh masukan berharga untuk menyusun materi pembelajaran yang kontekstual dan mudah digunakan oleh wisatawan asing.

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan mutu pengajaran BIPA, Balai Bahasa NTB menyelenggarakan Bimbingan Teknis Program BIPA Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) secara daring selama tiga hari mulai tanggal 26--28 Juni 2025. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Balai Bahasa NTB, Dwi Pratiwi, dan Kepala Bidang Kemitraan dan Diplomasi Kebahasaan, Dony Setiawan, yang menekankan pentingnya pemahaman regulasi baru bagi pengajar BIPA. Materi disampaikan oleh pakar ke-BIPA-an seperti Iyus Yusuf, Liliana Muliastuti, Suharsono, dan Gatut Susanto, mencakup kebijakan pengembangan SKKNI, substansi kompetensi, dan perspektif profesionalisme pengajar BIPA. Kegiatan ini juga membahas proses sertifikasi yang akan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), termasuk pengakuan pengalaman dan pelatihan yang relevan. Diharapkan, para pengajar dan pegiat BIPA memperoleh wawasan dan semangat baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperkuat posisi bahasa Indonesia di kancah internasional.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan pendampingan langsung ke lembaga BIPA sangat bergantung pada mobilitas tim, namun pembatasan anggaran perjalanan dinas membatasi frekuensi kunjungan dan jangkauan fasilitasi, terutama ke wilayah-wilayah wisata yang menjadi titik strategis pengajaran BIPA.
2. Setiap lembaga memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, mulai dari lembaga baru seperti Suka Bahasa hingga desa wisata seperti Bilebante. Perbedaan ini menuntut pendekatan fasilitasi yang fleksibel dan berbasis kebutuhan, yang belum sepenuhnya terstandarisasi.
3. Sebagian besar pengajar BIPA di NTB belum memiliki sertifikasi kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Hal ini berpengaruh pada kualitas dan kredibilitas pengajaran, terutama dalam konteks internasionalisasi bahasa Indonesia.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Balai Bahasa NTB aktif merespons permintaan pendampingan dari lembaga baru seperti Suka Bahasa, dengan memberikan pelatihan awal dan berbagi praktik baik. Strategi ini memperkuat fondasi pengajaran BIPA dan memperluas jaringan mitra fasilitasi.
2. Kegiatan Mandalika-BUMI menjadi wadah strategis untuk menjalin kemitraan dengan komunitas dan desa wisata, serta menggali kebutuhan lokal yang dapat diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran BIPA. Pendekatan ini memperkuat relevansi dan keberterimaan program di lapangan..
3. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan memperluas akses pelatihan, Balai Bahasa NTB menyelenggarakan Bimtek daring selama tiga hari dengan materi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan proses sertifikasi. Strategi ini membuka peluang peningkatan kompetensi



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

pengajar BIPA secara efisien dan terstandar.

[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat

[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan II Tahun 2025, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat capaian nilai dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar **91,44**. Meskipun nilai tersebut masih jauh dari target nilai IKPA sebesar $\geq 95,00$ namun capaian tersebut sudah masuk kategori Baik. Capaian ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, yang dinilai melalui tujuh aspek utama: kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dari aspek-aspek tersebut, Balai Bahasa NTB memperoleh nilai Sangat Baik (100) pada kualitas pelaksanaan anggaran, nilai Baik (92,68) pada Kualitas Perencanaan dan nilai Cukup (74,53) pada kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Untuk mengejar target capaian nilai Sangat Baik, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat harus menguatkan komitmen tim dalam menjaga akurasi perencanaan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan. Deviasi halaman III DIPA masih terjadi sehingga diperlukan strategi pencapaian target yang terstruktur sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan sesuai dengan rencana yang sudah disepakati bersama. Tim Perencanaan sangat diharapkan mampu memanfaatkan periode revisi Halaman III DIPA untuk menyesuaikan dan menyusun kembali target pada triwulan berikutnya. Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat juga masih memiliki waktu yang cukup pada triwulan berikutnya untuk memperbaiki dan meningkatkan nilai Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran. Pendampingan tata cara pengisian capaian output yang optimal perlu dilakukan sehingga target nilai bisa dicapai pada periode mendatang.

Secara kuantitatif, total realisasi anggaran pada Triwulan II mencapai Rp4.217.780.926 atau **39,35%** dari total pagu sebesar Rp10.719.277.000. Realisasi ini terdiri atas 49,78% untuk Belanja Pegawai (Rp1.244.388.873 dari pagu Rp2.500.000.000) dan 35,99% untuk Belanja Barang (Rp2.958.250.892 dari pagu Rp8.219.277.000). Realisasi anggaran Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sesungguhnya sudah sesuai dengan target karena sampai periode triwulan II ini masih terdapat blokir pagu sebesar Rp1.506.054.000,00. Balai Bahasa NTB tetap menjaga akuntabilitas dan ketepatan waktu dalam pelaporan, sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan adaptif.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target adalah sebagai berikut.

1. Ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan menyebabkan penurunan skor pada aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, sehingga memengaruhi nilai akhir IKPA secara keseluruhan.
2. Meskipun pelaksanaan anggaran sudah optimal, pengisian capaian output belum sepenuhnya mencerminkan hasil kegiatan secara kuantitatif dan kualitatif, sehingga menurunkan nilai pada aspek hasil pelaksanaan.
3. Terdapat pagu sebesar Rp1.506.054.000 yang masih diblokir hingga akhir Triwulan II, membatasi fleksibilitas pelaksanaan kegiatan dan berdampak pada realisasi belanja barang yang belum maksimal.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Tim Perencanaan perlu memanfaatkan periode revisi untuk menyusun kembali target kegiatan secara realistis dan sinkron dengan kondisi anggaran, sehingga deviasi dapat diminimalkan pada triwulan berikutnya.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

2. Diperlukan pelatihan atau asistensi teknis bagi tim pelaksana agar pengisian capaian output lebih akurat dan sesuai dengan indikator kinerja, sehingga nilai kualitas hasil pelaksanaan dapat meningkat.
3. Dengan mempertimbangkan blokir anggaran yang masih berlangsung, strategi pelaksanaan kegiatan perlu disesuaikan agar tetap relevan dan berdampak, tanpa melanggar prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

[SK 7] Meningkatkan tata kelola Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat

[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat minimal A

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan II Tahun 2025, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan komitmen kuat terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui tiga kegiatan utama: 1) perencanaan anggaran dan kinerja, dan 2) evaluasi pelaksanaan program dan anggaran. Dua kegiatan utama ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mempertahankan predikat akuntabilitas minimal A sesuai indikator kinerja [IKK 7.2].

Kegiatan Perencanaan pada periode ini adalah pembukaan sebagian blokir kode A yang memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel dari sebelumnya sehingga satuan kerja bisa merencanakan kembali pelaksanaan kegiatan yang relevan dengan kualitas capaian dan sesuai dengan ketentuan Inpres Nomor 1 tahun 2025. Selain itu, pada periode triwulan juga berlangsung revisi buka dan pengalihan blokir kode 2 yang dilakukan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Revisi tersebut berupa Pergeseran Anggaran dari akun 526 ke akun lain (Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra), pembukaan blokir kode 2 dan pengalihan anggaran penerjemahan (Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra) ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk pencetakan hasil penerjemahan, dan Pengalihan Anggaran kode blokir 2 (prioritas Menteri) dari satker di Badan Bahasa ke Sekretariat Jenderal, Kemendikdasmen.

Proses revisi tersebut tentu saja berdampak pada terhambatnya pelaksanaan kegiatan karena proses revisi DJA menghentikan seluruh aktivitas penyesuaian pagu bagi satuan kerja. Revisi DJA juga biasanya dilaksanakan dalam waktu yang lebih lama karena bersifat kolektif dan telaah berjenjang dari eselon satu, biro perencanaan, APIP, dan DJA. Revisi tersebut juga dilaksanakan sekaligus penyesuaian halaman III DIPA bagi satuan kerja. Hasil dari revisi DJA tersebut bagi Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah dialihkan pagu blokir kode 2 sejumlah Rp383.445.000,00 dan ditambahkan pagu cetak sebesar Rp174.600.000,00 sehingga total pagu anggaran menjadi Rp10.510.432.000,00.

Selain perencanaan anggaran melalui revisi, pada triwulan II ini Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengikuti kegiatan Sosialisasi Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat, 2 Mei 2025 pukul 14.00 WIB, dan diikuti oleh seluruh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan kementerian. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis terkait penyusunan PK Tahun 2025 menggunakan aplikasi SPASIKITA, serta memastikan keselarasan antara target kinerja satuan kerja dengan arah kebijakan kementerian secara menyeluruh.

Rapat evaluasi pelaksanaan program dan anggaran secara berkala tetap dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rapat evaluasi telah dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2025 untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada bulan April 2025. Rapat berikutnya dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2025 untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan Anggaran pada bulan Mei 2025. Dan rapat pelaksanaan kegiatan dan anggaran bulan Juni 2025 dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025. Pada rapat tanggal 26 Juni 2026 disampaikan evaluasi capaian program dan anggaran dari bulan Januari – Juni 2025 sekaligus langkah-langkah antisipasi dan persiapan pelaksanaan kegiatan triwulan ke-II. Dalam setiap rapat seluruh Tim Kerja menyampaikan progres capaian kegiatan pada tim masing-masing kemudian menyampaikan kendala-kendala dalam pelaksanaan. Pimpinan akan memberikan rekomendasi strategi pencapaian target atau langkah antisipasi dalam pelaksanaan kegiatan sejenis di masa yang akan datang.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target adalah sebagai berikut.

1. Lambatnya proses revisi DJA secara kolektif dan berjenjang. Proses revisi anggaran yang melibatkan banyak tahapan telaah dari eselon satu, biro perencanaan, APIP, hingga DJA menyebabkan keterlambatan dalam penyesuaian pagu dan pelaksanaan kegiatan.
2. Terhentinya aktivitas penyesuaian pagu selama revisi berlangsung. Selama proses revisi DJA, satuan kerja tidak dapat melakukan penyesuaian anggaran, sehingga kegiatan yang sudah direncanakan menjadi tertunda atau tidak optimal.
3. Ketergantungan pada pengalihan anggaran antar unit kerja. Pengalihan anggaran dari pusat ke UPT atau antar satker memerlukan koordinasi lintas unit yang kompleks dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian waktu pelaksanaan kegiatan.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Pemetaan jadwal revisi dan penguatan koordinasi lintas unit. Menyusun timeline internal yang mengantisipasi durasi revisi DJA dan memperkuat komunikasi dengan unit terkait agar proses pengalihan anggaran berjalan lebih sinkron dan efisien.
2. Optimalisasi kegiatan non-anggaran selama masa revisi. Memanfaatkan waktu revisi untuk menyelesaikan kegiatan yang tidak bergantung langsung pada anggaran, seperti penyusunan dokumen teknis, pelatihan internal, atau koordinasi program.
3. Pemanfaatan hasil sosialisasi SPASIKITA untuk penyelarasan PK. Mengintegrasikan pemahaman dari sosialisasi aplikasi SPASIKITA ke dalam penyusunan Perjanjian Kinerja agar target kinerja lebih adaptif terhadap dinamika anggaran dan kebijakan pusat.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DI.7569.PEG.001] Perhelatan Karya Kreatif Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	Kegiatan	1	2	Rp614.370.000	Rp313.575.150	51.04
2	[DI.7569.QDC.001] Penutur bahasa terbina	Orang	175	198	Rp270.228.000	Rp135.893.950	50.29
3	[DI.7569.QDC.002] Penutur bahasa teruji	Orang	1937	4255	Rp350.000.000	Rp153.158.100	43.76
4	[DI.7569.QDC.003] Generasi muda terbina program literasi	Orang	0	400	Rp524.386.000	Rp248.786.439	47.44
5	[DI.7569.QMA.002] Produk Kamus dan Pedoman Kebahasaan	dokumen	0	0	Rp145.365.000	Rp65.658.176	45.17



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
6	[DI.7569.QMA.003] Produk Penerjemahan	dokumen	0	17	Rp1.129.554.000	Rp778.274.105	68.90
7	[DU.7566.PEG.001] Perhelatan Karya Kreatif Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	Kegiatan	0	0	Rp547.026.000	Rp16.184.400	2.96
8	[DU.7566.QDC.001] Penutur Bahasa Daerah Terfasilitasi Program Pelindungan Bahasa Daerah	Orang	0	180	Rp1.235.238.000	Rp978.822.743	79.24
9	[DU.7566.QMA.002] Peta Kebinekaan Bahasa dan Sastra	dokumen	0	0	Rp114.870.000	Rp45.796.500	39.87
10	[DU.7567.BDB.001] Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan	Lembaga	0	0	Rp166.675.000	Rp31.979.200	19.19
11	[DU.7567.BDB.002] Komunitas Penggerak Literasi Terbina	Lembaga	25	57	Rp608.000.000	Rp307.123.430	50.51
12	[DU.7568.QDB.001] Lembaga Terfasilitasi Program BIPA	Lembaga	5	5	Rp98.296.000	Rp28.842.600	29.34
13	[WA.7613.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	0	0	Rp10.000.000	Rp2.334.500	23.35
14	[WA.7613.EBA.958] Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Dokumen	0	0	Rp216.578.000	Rp29.871.057	13.79
15	[WA.7613.EBA.960] Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Dokumen	0	0	Rp60.390.000	Rp7.558.680	12.52
16	[WA.7613.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp182.857.000	Rp102.608.757	56.11
17	[WA.7613.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp4.000.000.000	Rp2.621.250.234	65.53



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
18	[WA.7613.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	0	0	Rp184.071.000	Rp31.881.850	17.32
19	[WA.7613.EBD.955] Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	0	1	Rp41.628.000	Rp10.044.900	24.13
20	[WA.7613.EBD.974] Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	0	0	Rp10.900.000	Rp4.522.650	41.49
Total Anggaran					Rp10.510.432.000	Rp5.914.167.421	56.27

D. Rekomendasi Pimpinan

Rekomendasi TW 2

[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca

Rekomendasi:

Susun desain kegiatan literasi berbasis BBMMB sambil menunggu juknis, libatkan guru dan komunitas lokal sebagai mitra, serta koordinasikan dengan tim Literasi dan Penerjemahan untuk penetapan kualitas peserta dan pemanfaatan produk cerita anak

[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik

Rekomendasi:

Lanjutkan distribusi 18 buku cerita ke SD di NTB, koordinasikan pemanfaatannya dengan tim Literasi, libatkan jejaring komunitas dan sekolah dalam publikasi sayembara, serta lakukan pemantauan ke sekolah penerima untuk menilai kebermanfaatan produk.

[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya
Rekomendasi:

Perluas UKBI ke sekolah swasta dengan pendekatan kelas perwakilan dan simulasi daring, pelibatan tim teknis dan TU, serta adanya pendataan kemahiran peserta berdasarkan profesi.

[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya

Rekomendasi:

Laksanakan tahap akhir kegiatan Kemahiran Berbahasa Indonesia dengan fokus pada tes akhir dan UKBI. Pastikan peserta yang aktif mendapatkan sertifikat sebagai insentif.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaannya

Rekomendasi:

Libatkan pemangku kepentingan dalam penentuan peserta dan lokasi kegiatan, susun pola kegiatan yang aplikatif, dan fokuskan pendampingan pada lembaga pendidikan serta instansi yang telah menunjukkan komitmen awal

[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya

Rekomendasi:

Susun pola pendampingan BBMMBB yang efektif, didukung pangkalan data hasil, serta memanfaatkan komunitas/sekolah unggulan untuk pemantauan dan evaluasi perkembangan

[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi

Rekomendasi:

Validasi hasil inventarisasi kosakata dari Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat dalam kegiatan lokakarya.

[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan

Rekomendasi:

Laksanakan lokakarya internal berbasis hasil pelatihan DKT dan kepakaran pemetaan. Bentuk tim pemetaan daerah dan mulai identifikasi titik pengamatan serta narasumber lokal.

[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas

Rekomendasi:

Mendorong pengimbasan materi RBD oleh guru master ke sekolah-sekolah di 10 kabupaten/kota dan memastikan setiap guru master menyampaikan data pengimbasan yang telah dilaksanakan.

[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)

Rekomendasi:

Lanjutkan pendampingan ke 3 lembaga BIPA tambahan untuk memenuhi ketercapaian RO dan mulai menghitung keseusian target dengan definisi operasional yang telah ditetapkan.

[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Rekomendasi:

Optimalkan pengisian capaian output dan manfaatkan revisi Halaman III DIPA untuk menyusun target kegiatan yang lebih sinkron dan realistis. Lakukan asistensi teknis bagi tim pelaksana.

[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat minimal A

Rekomendasi:

Laksanakan lini masa penginputan data pada aplikasi SPASIKITA dan sosialisasi hasil penyusunan PK, Rencana AKSI, dan Pengukuran Kinerja pada laman dan media sosial.

Mataram, 29 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Bahasa Provinsi NTB

Dwi Pratiwi



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**